BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap penyebaran konten *deepfake* terhadap citra publik figur dengan mengambil audio maupun visual tanpa izin melalui platform Facebook yang ditujukan untuk tujuan komersial berupa penjualan produk obat herbal merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan atau tindakan tersebut memenuhi keempat unsur antara lain: adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan terdapat hubungan sebab-akibat. Perbuatan melanggar hukum ini harus dibarengi dengan adanya kerugian yang diderita oleh korban yang mana terbagi menjadi dua yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dengan adanya penyalahgunaan *deepfake* untuk tujuan komersial menimbulkan kerugian materiil baik bagi masyarakat maupun korban yang mana korban merupakan publik figur sehingga berpotensi kehilangan pendapatan. Sedangkan secara immateriil, kerugian yang didapat korban adalah berkaitan dengan reputasi atau citra publik figur yang menjadi buruk karena adanya konten iklan yang dianggap *misleading* atau hoaks. Dengan demikian, penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dapat membebaskan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang di derita korban.

2. Penyelesaian sengketa akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terhadap penyebarluasan konten *deepfake* terhadap citra publik figur dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara non litigasi dan litigasi. Dalam kasus ini jalur non litigasi dilakukan melalui klarifikasi sebagai respon korban untuk meredam kegaduhan yang ada di masyarakat sebagai akibat dari tidak diketahuinya identitas dan keberadaan pelaku. Namun apabila pelaku dapat diidentifikasi, maka penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui beberapa jalur yakni negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi tergantung terhadap preferensi kedua belah pihak. Sedangkan jalur litigasi dapat dilaksanakan dengan melalui dua ketentuan yakni ketentuan pidana dan perdata yang didasarkan atas pelanggaran terhadap UU ITE. Ketentuan pidana berfokus pada penipuan serta pencemaran nama baik dari korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Sedangkan ketentuan perdata dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi ditujukan untuk mencapai kepastian hukum serta keadilan bagi korban.

4.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran yang antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan yang secara khusus mengatur terkait dengan *Artificial Intelligence* (AI) khususnya dalam bentuk *deepfake* yang seringkali masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan kecerdasan buatan yang ada hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan meningkatkan regulasi, maka kedepannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara jelas dan sesuai berdasarkan atas apa yang telah ditentukan dalam regulasi yang telah dibuat untuk diterapkan di era masa kini yang hampir seluruh aspek kehidupan telah banyak mengenal dan menggunakan *Artificial Intelligence* (AI).
2. Meningkatkan infrastruktur teknologi yang lebih baik, supaya dapat mengawasi dan mendukung perkembangan teknologi dalam hal *Artificial Intelligence* (AI) khususnya untuk Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat perangkat-perangkat yang terdapat didalamnya, karena infrastruktur teknologi yang baik akan memudahkan penggunaan kecanggihan teknologi khususnya kecerdasan buatan ini menjadi lebih efisien dan aman digunakan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan edukasi mengenai *Artificial Intelligence* (AI), selain itu masyarakat juga harus sadar dan mengenal bahwa teknologi saat ini sangat berkembang dan perlu adanya kehati-hatian serta bijak di dalam penggunaannya. Kecerdasan buatan seperti *deepfake* apabila tidak diberikan pemahaman akan tujuan dan kegunaannya, maka membuka peluang akan adanya penyalahgunaan akibat belum memahami apa resikonya. Sebab itu,

perlu adanya penyuluhan terbuka kepada masyarakat untuk mengenalkan pemakaian teknologi digital yang bijak dan membangun budaya kemajuan teknologi yang sehat.

4. Meningkatkan kompetensi penegak hukum sekaligus pemerintahan dalam membantu menangani kasus penyalahgunaan di bidang teknologi digital khususnya di Indonesia. Dengan ini maka selain masyarakat juga harus *aware* akan pentingnya pemahaman era digital saat ini, tetapi pihak-pihak yang berwenang juga seperti penegak hukum dan pemerintahan harus siap dan tanggap serta memahami akan perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan agar mampu merespon dan menangani kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi seperti *Artificial Intelligence* berupa *deepfake* dengan cara profesional dan akurat.